



MEMIKIRKAN KEMBALI KEBUTUHAN UTAMA PEMBANGUNAN BANGSA DI INDONESIA: PENDIDIKAN

Wiratama, Dias Oldy, Rofii, Muhammad Syaroni, Ras, Abdul Rivai

Prodi Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

Abstrak

Sejak kemerdekaannya pada 1945, Indonesia telah menjelma sebagai negara berkembang yang telah melewati berbagai guncangan dan transformasi. Pertumbuhan bangsa Indonesia yang melewati berbagai transformasi membuat proses pembangunan bangsa menjadi dinamis. Saat ini, Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi yang membuatnya memiliki keunggulan khusus dibandingkan negara lain untuk dijadikan sebagai momentum katalis perkembangan bangsanya. Namun itu semua hanya dapat diwujudkan melalui mekanisme yang tepat, berangkat dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini mengamati bahwa Pendidikan merupakan faktor vital dalam pembangunan manusia bahkan bangsa Indonesia di tahapan State-building saat ini, untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang optimal di masa emas Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi faktor penghambat besar bagi suksesnya Pendidikan di Indonesia. Metode kualitatif dengan uraian deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan multidimensi.

Kata Kunci: Kebutuhan, Utama, Pembangunan, Bangsa, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Perjalanan Indonesia dari masa penjajahan hingga merdeka telah membentuk sebuah rasa persamaan diantara masyarakat, yang merupakan modal yang cukup untuk membentuk nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Adanya rasa kesamaan dalam penderitaan, yang disatukan oleh bahasa,

akan membentuk kekuatan yang bernama nasionalisme (Fukuyama, 2006). Diawali penjajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun, disusul pendudukan Jepang selama 3,5 tahun sejak April 1942 yang ditandai Perjanjian Kalijati. Kemudian, dengan memanfaatkan momentum geopolitik dimana Jepang menyerah terhadap sekutu akibat peristiwa "Hiroshima-

*Correspondence Address : diasoldy12@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023. 2304-2313

© 2023UM-Tapsel Press

Nagasaki” dan semangat kemerdekaan akhirnya Indonesia bisa meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Jepang dan Indonesia sama-sama berada di benua Asia, sama-sama mengalami peperangan dalam sejarah kebangsaannya, dan rakyatnya sama-sama mengalami pengalaman buruk akibat perang. Perbedaannya, saat ini Jepang menjadi negara yang lebih maju daripada Indonesia di berbagai bidang. Perbedaan perkembangan pembangunan negara antara Jepang dan Indonesia bukan karena suatu kebetulan, melainkan dengan proses yang panjang, pembelajaran, perjuangan, dan kerja sama seluruh komponen negara. Namun ada yang menjadi pembeda antara Indonesia dan Jepang, terlepas dari kemiripan latar belakang sejarahnya. Berdasarkan data yang dirilis The Population Review, Indonesia berada di posisi 54 dari 113 negara dalam hal kualitas pendidikan (World Population Review, 2022a) dibawah Jepang (7/113) dan bahkan Malaysia (38/113). Bagaimana perbedaan itu bisa ada dengan pangkal rasa kesamaan sejarah, ras, dan regional yang relatif mirip, menunjukkan bahwa ada faktor pembeda antara Indonesia dengan Jepang maupun Malaysia dalam pembangunan bangsa dan negara.

Fakta yang menarik adalah, adanya kebiasaan membaca masyarakat Jepang yang merupakan cikal bakal keberhasilan Jepang menjadi negara maju di bidang teknologi. Begitu juga Malaysia, pada periode tahun 1980-an, Indonesia mengirim tenaga pendidik ke Malaysia untuk menjadi pengajar di sekolah-sekolah Malaysia. Dan hasilnya, saat ini laporan (HDI tahun 2019) justru Malaysia yang menjadi 15 besar negara dalam perkembangan teknologi.

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan potensi kekayaan alam melimpah serta memiliki keunggulan yaitu semangat juang yang disatukan dalam Pancasila oleh para

pendiri bangsa Indonesia terdahulu. Di samping itu, saat ini Indonesia sedang berada dalam masa bonus demografi. Dengan adanya bonus demografi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan dalam berbagai bidang yang disebabkan penurunan rasio ketergantungan. Namun di lain sisi, bonus demografi tidak akan memberikan efek positif apabila tidak dipersiapkan dengan optimal, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta menyiapkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualitas SDM tersebut (Falikhah, 2017).

Bonus demografi tidak akan memberikan dampak positif bagi sebuah negara apabila tidak diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang baik (Falikhah, 2017). Ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lahan untuk hidup, hingga memberi dampak kemajuan jangka panjang yaitu sektor pendidikan akan menjadi sektor yang terancam apabila bonus demografi tidak disiapkan dengan matang. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum bisa memaksimalkan potensi bonus demografi ini, terbukti dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021c).

Momentum bonus demografi selayaknya bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah selaku stake holder harus membuat program perencanaan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi. BPS telah membuat kajian mengenai proyeksi Indonesia yang akan mengalami bonus demografi terhitung mulai tahun 2012 hingga 2035 (Badan Pusat Statistik, 2021a).

Pada tahun 1971, jumlah rasio ketergantungan penduduk Indonesia mencapai 86%. Namun angka tersebut terus menunjukkan penurunan hingga pada tahun 2012 menyentuh di bawah 50% (Lestari, 2019). Secara matematis, bonus demografi berlangsung sejak

melewati angka 50% dari rasio ketergantungan, yang terjadi pada 2012 hingga saat ini. Berdasarkan data BPS, bonus demografi akan mencapai puncak pada periode tahun 2025 hingga 2030, dimana jumlah penduduk produktif adalah 70% dari total keseluruhan jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik, 2021a).

Artinya, sejak 10 tahun yang lalu (tahun 2012) hingga 13 tahun kedepan (tahun 2035) Indonesia tengah mengalami bonus demografi. Apa saja yang berubah sejak 10 tahun yang lalu dibandingkan sebelum bonus demografi, data yang ditunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyebutkan adanya perkembangan dalam skor IPM, namun didalamnya masih menyimpan angka disparitas yang tinggi khususnya di bidang kualitas pendidikan dan persebaran penduduk (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dengan segala potensi dan keunggulannya, Indonesia layak untuk menjadi salah satu negara maju. Namun yang saat ini terjadi, Indonesia masih berada diantara negara berkembang yang bergelut di masa demokrasi pasca-reformasi yang begitu cepat. Hasilnya, seperti yang telah diperkirakan dalam siklus polybius (Loehr, 2021), saat ini Indonesia sedang dalam masa transisi dari Demokrasi ke Oligarki, atau bahkan sedang dalam masa Oligarki ke arah Anarki. Dimana masih terdapat jarak (gap) antara tujuan yang digariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dengan kenyataan yang ada. Praktek korupsi, politik uang dan patronase, hingga konflik horizontal dalam negeri masih mewarnai perjalanan pasca-kemerdekaan (Sukmajati & Aspinall, 2015).

Lain halnya dengan negara yang memiliki kesamaan historis dengan Indonesia seperti Jepang yang bisa memanfaatkan momentum keterpurukan pada 1945 untuk lahir

kembali menjadi sebuah negara yang terdepan dalam hal teknologi, karena baiknya sistem pendidikan di Jepang. Inilah yang menjadi latar belakang pemilihan tema, karena pendidikan merupakan faktor penentu yang memiliki efek jangka panjang bagi sebuah negara dalam keberhasilan pembangunannya.

Pertanyaan mengenai bagaimana Jepang dan negara-negara maju dapat mencapai tujuan pembangunan negaranya akan bermuara kepada bagaimana pendidikan menjadi faktor penentu dalam kemajuan pembangunan negara. Mengapa pendidikan? Mempelajari kecenderungan negara maju, keseluruhan negara tersebut sangat mengutamakan pendidikan dalam rencana jangka panjang pembangunan negaranya. Oleh karena itu Pendidikan akan menjadi fokus penelitian yang akan didalami di bab Analisis.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam studi literatur pembahasan obyek tulisan ini, dengan pola penjabaran deskriptif analitis (J. W. Creswell, 2013). Mula-mula akan diberikan definisi Nasionalisme, Nation-Building, dan State-Building dalam sudut pandang Francis Fukuyama untuk memberikan koridor pembahasan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai betapa pentingnya peran pendidikan bagi kemajuan sebuah negara, yang dibuktikan dengan data kredibel dari sumber laporan resmi internasional dan nasional. Akan dijelaskan juga letak perbedaan bangsa dan negara, serta bagaimana paradigma mengenai pembangunan negara saat ini telah bergeser, untuk memberikan arah yang jelas bagi pembaca dalam mengikuti pola pemikiran penulis hingga di simpulkan di bab akhir. Pendekatan multidimensi dikemukakan dalam penjabaran analisis guna mendapatkan kesimpulan yang holistik tanpa melintasi

batasan disiplin ilmu maupun mengurangi nilai ketajaman literatur yang dijadikan sumber rujukan analisis (Hanita, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koridor Bangsa, Negara, dan Pembangunan Negara (State-building)

Secara harafiah, pembangunan negara berasal dari penerjemahan bahasa Inggris dari state-building. Dalam buku *State-building: Governance and World Order in the 21st Century* (Fukuyama, 2004), pengertian pembangunan negara adalah menciptakan institusi negara baru sembari memperkuat yang sudah ada. Jadi dapat diartikan bahwa pemangunan negara adalah sebuah mekanisme yang diciptakan suatu negara untuk mencapai tujuannya.

Dalam sudut pandang Francis Fukuyama, terdapat tahapan bagi sebuah negara untuk dapat mencapai ke tingkat pembangunan negara (Fukuyama, 2006). Mula-mula, sebuah negara harus dibentuk melalui kumpulan manusia didalam suatu wilayah yang memiliki kebutuhan untuk pengakuan akan martabat nya (Fukuyama, 2019). Kemudian terjadi pergeseran terminologi martabat menjadi keinginan untuk diakui eksistensinya dalam proses dinamika sejarah yang dilalui dengan peperangan baik konvnsional maupun ideologi dan agama (Fukuyama, 2019), yang setekahnya membentuk suatu rasa kesamaan yang berkembang menjadi nasionalisme.

Adanya rasa kesamaan dalam penderitaan, kesamaan ras, hingga pada akhirnya bahasa, akan membentuk suatu hal yang bernama nasionalisme (Fukuyama, 2006). Nasionalisme inilah cikal bakal terbentuknya sebuah bangsa yang nantinya akan menjadi negara. Berdirinya negara pun seperti yang telah kita pahami dan ketahui adalah harus adanya rakyat (people), wilayah (land),

dan pemerintahan (government) yang berdaulat atas rakyat dan wilayah tersebut (Tuathail & Dalby, 1999). Barry Buzan (Buzan, 1991) pun menambahkan pengakuan secara de facto dan de jure dari negara lain sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara dengan alasan kebutuhan akan keamanan.

Lalu pembicaraan akan mengarah perbedaan bangsa dan negara; pengertian bangsa adalah suatu masyarakat yang mempunyai akar sejarah yang sama dimana kejadian pengalaman atas penjajahan terasa begitu melekat diantara masyarakat, yang semakin lama akan mengawetkan rasa solidaritas yang tinggi diantaranya (Anderson, 2006). Sementara Fredrich Ratzel (Smith, 2013) mengatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu, dimana hasrat tersebut timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Maka disini, pengertian bangsa adalah masyarakat (kumpulan manusia) dalam satu wilayah yang disatukan dalam rasa kesamaan baik karena sejarah, penderitaan, suku, dan ras yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi.

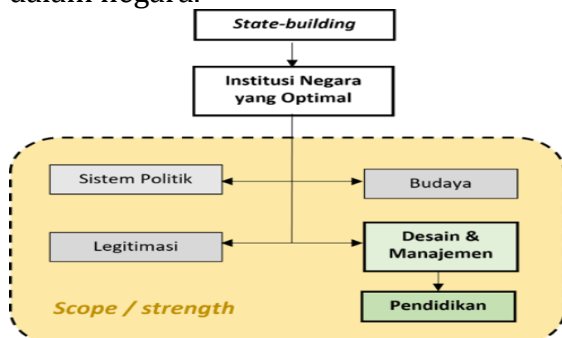
Di lain sisi, Max Weber dalam buku *Strategic Studies* menyimpulkan pengertian negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan hard approach secara sah dalam suatu wilayah (Mahnken & Maiolo, 2008). Sementara Harold J. Laski (Laski, 2017) menggariskan pengertian negara sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang memaksa dan sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok, dan merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat merupakan negara apabila cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun kelompok ditentukan oleh sebuah wewenang yang bersifat mengikat.

Tabel 1 Perbedaan bangsa dan negara

No	Bangsa	Negara
1	Sekumpulan masyarakat tanpa organisasi	Organisasi didalam masyarakat yang mengatur
2	Tidak punya legitimasi	Memiliki legitimasi dalam otoritas mengatur masyarakat
3	Terikat dalam suatu identitas tertentu	Tidak terikat pada satu ras, bahasa, adat
4	Suatu bangsa belum tentu memiliki negara	Negara pasti memiliki suatu bangsa

Sumber Tabel: Olahan peneliti, 2023

Keberhasilan pembangunan negara ditentukan oleh bagaimana negara menyiapkan mekanisme, regulasi, dan iklim yang mendukung bagi masyarakatnya untuk mengembangkan kualitas diri. Sesuai dengan teori organisasi (Daft, 2010) dan pengertian state-building ala Francis Fukuyama (Fukuyama, 2004), dimana top leader (pemerintah) menciptakan iklim, dan negara harus memiliki mekanisme yang diwujudkan dalam bentuk institusi negara yang optimal untuk mengawal proses pembangunan negara hingga berada sedekat mungkin dengan yang di cita-citakan suatu bangsa. Perlu diingat, pembangunan negara dan pembangunan bangsa memiliki perbedaan signifikan dikarenakan adanya perbedaan arti (baca tabel1), dimana pembangunan bangsa lebih ke arah moral sementara pembangunan negara lebih ke arah sistem yang diciptakan oleh otoritas dalam negara.



Gambar 1. Bagan scope and strength

Sumber Gambar : Fukuyama, 2004

Dalam hal ini, pendidikan memegang peran besar dalam membawa mayoritas garis kualitas masyarakat pada umumnya menjadi naik. dalam pembangunan bangsa yang optimal, dikenal adanya scope and strength akan 4 faktor penentu dalam pembangunan negara; (1) sistem politik, (2) legitimasi, (3) budaya, (4) desain & manajemen. Pendidikan merupakan buah dari desain dan manajemen untuk menentukan bagaimana scope and strength akan diarahkan. Sebuah negara harus menentukan pilihan untuk memperkuat salah satu dari empat faktor tersebut, atau menjadi besar dengan scope (ruang lingkup yang luas tanpa daya keunggulan yang signifikan dalam suatu faktor (Fukuyama, 2004).

Implikasinya adalah, akan ada negara yang tajam di 1 faktor, namun lemah di faktor lain. Ada juga negara yang seimbang dalam pembangunan negaranya, tanpa adanya kekuatan yang menonjol dari salah satu faktor. Negara-negara dengan sistem demokrasi cenderung lebih banyak menyeimbangkan 4 faktor tersebut dibandingkan negara yang bersistem monarki ataupun komunis dan sosialis seperti China, Korea Utara, dan Saudi. Dan uniknya, dalam data yang akan di bahas di sub bab berikutnya, pendidikan memiliki peran yang krusial dalam keseimbangan scope yang nantinya menjadi penentu kemajuan pembangunan negara.

Baik tidaknya pengelolaan negara akan terlihat dari bagaimana masyarakat penyusunnya berkembang secara kualitas, bukan kuantitas. Kenaikan kualitas manusia ini dapat dilihat dari beberapa data seperti Human Development Index (HDI) di level internasional, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level nasional Indonesia

Pendidikan Sebagai Ukuran Keberhasilan Pembangunan Negara

Seluruh negara yang dikategorikan negara maju dalam statistik HDI memiliki kualitas pendidikan yang baik. Berdasarkan data HDI, 10 besar negara maju per tahun 2019 adalah (World Population Review, 2022)

Indonesia berada di peringkat 111 dari 187 negara. Nilai HDI ditentukan dengan menghitung skor suatu negara dalam berbagai aspek diantaranya; angka harapan hidup (life expectancy), tingkat “melek” huruf (literacy rate), akses populasi pedesaan ke listrik (rural population access to electricity), Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita (GDP), ekspor dan impor, tingkat pembunuhan, indeks kemiskinan multidimensi, ketidaksetaraan pendapatan, ketersediaan internet, dan beberapa aspek lainnya (World Population Review, 2022). Karena akuntabilitas dan kredibilitas data, maka HDI dijadikan rujukan data untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan negara

Apabila disandingkan dengan data kualitas pendidikan tahun 2020 (tahun berikutnya), maka hasilnya akan searah dengan nilai HDI. Negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia tahun 2020 (World Population Review, 2022)

Berdasarkan data, negara yang berada di 10 besar HDI dan Sistem Pendidikan (*) adalah; Denmark, Belanda, dan Jerman. Sementara Indonesia berada di peringkat ke 55 dari 78 negara yang terdaftar, unggul 1 peringkat diatas negara tetangga ASEAN, Filipina.

Secara umum, negara berkembang cenderung memberikan warganya kualitas pendidikan yang lebih tinggi daripada negara-negara yang kurang berkembang (third world countries), dan negara-negara maju menawarkan kualitas pendidikan yang terbaik diantara negara dunia ke dua dan

ke tiga. Ini adalah bukti bahwa pendidikan merupakan kontributor penting bagi perkembangan pembangunan negara mana pun secara keseluruhan.

Nelson Mandela pernah mengeluarkan kalimat historis “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia”. Pendidikan adalah indikator ideal keberhasilan pembangunan sebuah negara (Primarni, 2010). Hal ini didukung kuat dengan fakta bahwa satu tahun ajaran tambahan dalam waktu lama sekolah dapat meningkatkan penghasilan hingga sebesar 10-20% (US News, 2022). Maka disini jelas, bahwa pendidikan adalah faktor penentu dalam pembangunan negara.

Analisa Perkembangan Pendidikan di Indonesia

Untuk mendapatkan analisa yang mutakhir, akan disajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang dirilis tiap tahun oleh Badan Pusat Statisti (BPS) tahun 2010 hingga 2021 untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di Indonesia selama rentang waktu 10 tahun, lalu mendalami matriks data khususnya aspek pendidikan untuk mengidentifikasi permasalahan utama pendidikan di Indonesia. IPM dipilih karena terintegrasi dengan HDI, dimana HDI mengambil IPM sebagai data sekunder untuk mendukung kelengkapan data dalam pengukuran HDI sendiri.

Berdasarkan data IPM yang dirilis BPS, Indonesia mengalami pertumbuhan sejak tahun 2012 hingga 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021a). IPM merupakan indikator kualitas hidup manusia di Indonesia berlandaskan 3 aspek, yaitu (1) umur harapan hidup, (2) rata-rata lama sekolah, dan (3) pengeluaran per kapita per tahun. Peningkatan dari 67,7 (tahun 2012)

hingga 72,29 pada tahun 2021 adalah 4,6 dalam 9 tahun. Maka, rata-rata pertumbuhan IPM per-tahun adalah 0,5 poin. Ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan sudah melakukan upaya yang cukup baik untuk membuat setiap orang berkesempatan mendapatkan waktu pendidikan minimal (9 tahun). Hanya saja, ketidakmerataan lah yang menjadi penghalang suksesnya pendidikan yang ditandai rata-rata lama sekolah yang hanya 8,5 tahun. Provinsi Papua menjadi yang paling rendah dalam IPM. Walaupun sudah berwarna hijau (sedang), namun angkanya berbatasan dengan status rendah (rendah = skor < 60).

Masuk ke matriks data dalam IPM aspek pendidikan, terjadi disparitas baik di rataan lama sekolah maupun harapan lama sekolah antara Provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta) dan terendah (Papua). Inilah masalah utama dalam sektor pendidikan, yang menentukan dalam proses pembangunan negara.

Dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan angka IPM, namun hal yang perlu disadari adalah pemerataan masih jauh dari yang diharapkan. Apabila didalami, faktor disparitas IPM ini berakar dari ketidakmerataan sebaran penduduk di Indonesia. Dengan luas daratan 1,92 juta kilometer persegi (km²), kepadatan penduduk Indonesia adalah 141 jiwa per km². Angka ini terus meningkat apabila dibandingkan dengan data Sensus Penduduk tahun 2010 yang mencatat kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 124 jiwa per km², dan Sensus Penduduk tahun 2000 yang mencapai 107 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik, 2021b).

Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas daratan Jawa yang hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah darat Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau setara 56,10 %

penduduk Indonesia. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta orang, dimana menghimpun 21,68 % populasi. Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36 % dan Kalimantan mempunyai sebaran sebesar 6,15 %, sedangkan wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Maluku serta Papua masing masing sebesar 5,54 dan 3,17 % (Badan Pusat Statistik, 2021b).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengupayakan beberapa langkah untuk mengatasi disparitas pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan memberikan keterbukaan akses internet bagi daerah yang masih rendah kualitas dan kesempatan pendidikannya (Kemendikbud, 2020). Selain itu, penambahan tenaga pendidik di daerah Papua dan Maluku pun sudah digalakkan, namun masih menghadapi masalah animo tenaga pendidik. Hal ini berkaitan dengan kondisi keamanan di wilayah Papua dan Ambon yang kerap terjadi konflik horizontal, sehingga tenaga pendidik yang akan ditempatkan di wilayah tersebut memilih untuk tidak berangkat walaupun harus menerima sanksi administrasi. Faktor keamanan di wilayah timur Indonesia juga meghadirkan varian permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian tujuan pembangunan negara Indonesia.

Melihat negara dengan kualitas pendidikan yang bagus di data HDI, negara-negara tersebut memiliki jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang tidak setinggi Indonesia. Dengan luas wilayah daratan yang relatif kecil, geografis negara yang terdiri dari 1 daratan dan jumlah penduduk yang lebih sedikit; negara seperti Jerman, Belanda, Norwegia serta beberapa negara Nordik lainnya tidak menemui kesulitan yang setara dengan Indonesia.

Indonesia adalah negara archipelago (kepulauan) dengan ribuan

pulau yang tersebar dari Sabang, Aceh hingga Merauke, Papua. Sehingga, harus diakui bahwa Indonesia menemui tingkat kesulitan yang jelas lebih besar daripada Jerman dan Norwegia, bahkan negara Asia yang tergolong pesat pertumbuhan HDI nya seperti Jepang dan negeri tetangga Malaysia. Namun hal ini tidak selanjutnya dapat dijadikan alasan bagi Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia, untuk paling tidak membenahi arah dan niat pembangunan negara. Modal penting yaitu nasionalisme sudah dikantongi Indonesia dan tidak perlu diuji lagi kualitasnya.

Tanpa nasionalisme yang kuat, tidak mungkin dapat menyatukan ribuan suku dengan beragam bahasa dan ras menjadi sebuah bangsa dan negara sejak 77 tahun yang lalu. Keragaman dalam persatuan ini diabadikan dalam semboyan *Binneka Tunggal Ika* dalam lambang negara Indonesia "Garuda". Dan ini sudah disadari oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) Indonesia pada masa perjuangan hingga kemerdekaan di periode 1940-an, yang ditandai dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar landasan negara.

Pancasila merupakan simbol semangat yang juga modal utama nasionalisme di Indonesia, selain disatukannya masyarakat dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk secara bertahap dapat meraih tujuan pembangunan negara secara gotong royong.

SIMPULAN

Pendidikan adalah faktor penentu dalam kemajuan pembangunan negara, dan pemerataan sebaran penduduk merupakan kunci dari langkah awal memperbaiki pendidikan suatu bangsa. Seluruh data mengindikasikan bahwa negara dengan kualitas pendidikan yang baik akan cenderung lebih dekat dengan tujuan pembangunan

bangsa nya; menjadi negara yang maju dalam hal teknologi, kesehatan, dan ekonomi.

Banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia selaku otoritas pemerintahan yang berdaulat atas masyarakat Indonesia dalam membawa Indonesia meraih tujuan nasional nya sesuai UUD 45. Di posisi HDI saat ini, mula-mula Indonesia harus menyadari dan menerima posisi nya di antara negara-negara regional (ASEAN) dalam perbandingannya dengan seluruh negara di dunia. Faktanya, Indonesia bahkan bukan yang terbaik di ASEAN. Berawal dari kesadaran dan moral kebangsaan untuk bangkit inilah seharusnya Indonesia mampu bergotong royong, antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dari hasil analisa, urgensi yang utama adalah memperbaiki sektor pendidikan dengan langkah awal melakukan pemerataan sebaran penduduk. Karena masalah yang tidak kunjung membaik dan justru makin membesar adalah perbandingan penduduk kota dan desa. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas yang tinggi di sisi pendidikan, yang merupakan faktor utama dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, program yang harus digalakkan pemerintah Indonesia adalah program yang bagus untuk persebaran penduduk yang menunjang kualitas pendidikan melalui berbagai mekanisme seperti; (1) transmigrasi dengan penawaran reward lahan dan pendidikan, (2) meningkatkan keamanan di wilayah Indonesia timur khususnya Papua dan Ambon demi meningkatkan minat tenaga pendidik untuk ditempatkan di wilayah timur, (3) pemindahan ibukota dari Jakarta ke Penajam di Pulau Kalimantan, yang dilakukan secara bertahap dengan dasar riset ilmiah serta mempertimbangkan kondisi ekonomi.

Apabila program-program telah dibuat, maka keseriusan pemerintah dan pengawasan masyarakat untuk mengawal keberhasilan program akan menjadi konsentrasi selanjutnya. Kabar baiknya, saat ini Indonesia tengah berada di masa bonus demografi yang tentunya membutuhkan dibukanya banyak lapangan kerja.

Harapannya adalah, pemerintah Indonesia mampu mengesampingkan ego golongan untuk bersama-sama membangun negara. Dengan adanya kesamaan visi, maka proses yang harus dijalani suatu bangsa untuk meraih tujuannya akan lebih mudah, walau harus ditempuh dalam jangka waktu yang tidak singkat bahkan lintas generasi, seperti yang dilakukan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities* (Revised Edition).
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Berita Resmi Statistik*. Bps.Go.Id, 27, 1–16.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). *Sensus Penduduk 2020*. Bps.Go.Id, 27, 1–52.
- Badan Pusat Statistik. (2021c). *Statistik Indonesia 2021*. Statistik Indonesia 2020, 790.
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Brighton: Harvester-Wheatsheaf.
- Daft, R. (2010). *Organization Theory and Design*. In *Administrative Science Quarterly* (10th ed., Vol. 29, Issue 4). Joe Sabatino. <https://doi.org/10.2307/2392948>
- Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v16i32.1992>
- Fukuyama, F. (2004). *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Cornell University Press.
- Fukuyama, F. (2006). *Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq* (F. Fukuyama, Ed.). The John Hopkins University Press.
- Fukuyama, F. (2019). *Identity: the Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Hanita, M. (2020). *Ketahanan Nasional: Teori, Adaptasi, dan Strategi*. Universitas Indonesia Publishing.
- J. W. Creswell. (2013). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Approach) (Revisi)*. Pustaka Pelajar.
- Kemendikbud. (2020). *GTK KEMENDIKBUDRISTEK 2022*. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/upaya-mengakselerasi-pemerataan-pendidikan-di-indonesia>
- Laski, H. J. (2017). *The State in Theory and Practice* (3rd ed.). Routledge.
- Lestari, I. (2019). Bonus Demografi : Pengertian - Manfaat - Dampak - IlmuGeografi.com. <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/bonus-demografi>
- Loehr, R. M. (2021). The People's Moral Emotions in Polybius' Cycle of Constitutions. *Classical Philology*, 116(2), 155–182. <https://doi.org/10.1086/713585>
- Mahnken, T. G., & Maiolo, J. A. (2008). *Strategic Studies: A Reader*. In *Naval War College Review* (Issue 1). Routledge.
- Primarni, A. (2010). Pendidikan Sebagai Asas Pembangunan Negara (Studi Konseptual). 1–19.
- Smith, W. D. (2013). Friedrich Ratzel and the Origins of Lebensraum. *German Studies Review*, 3(1), 51.
- Sukmajati, M., & Aspinall, E. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. In *Polgov: Yogyakarta. Polgov*.
- Sumaryanto, Hermanto, Ariani, M., Yofa, S. H. S. R. D., & Azahari, D. H. (2015). Pengaruh Urbanisasi Terhadap Suksesi Sistem Pengelolaan Usahatani dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Swasembada Pangan. *Laporan Akhir ...*, 1–12.

Tuathail, G. O., & Dalby, S. (1999). Rethinking Geopolitics. In Choice Reviews Online. Routledge. <https://doi.org/10.5860/choice.36-5303>

US News. (2022). Best Countries - Rankings, News, Data | U.S. News Best Countries. <https://www.usnews.com/news/best-countries>

Widyarini. (2020). Faktor Penyebab Korupsi – Kemenkeu Learning Center. Badiklat Keuangan Malang. <https://klc.kemenkeu.go.id/faktor-penyebab-korupsi/>

World Population Review. (2022a). Education Rankings by Country 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>

World Population Review. (2022b). Human Development Index (HDI) by Country 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country>